

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yaitu usaha pembangunan yang dilakukan secara terus – menerus di semua sektor kehidupan masyarakat, yang meliputi sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan pendidikan (Purba *et al.*, 2021, p. 6). Di Indonesia pembangunan nasional yang ideal merupakan pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dikarenakan Pancasila dan UUD 1945 telah mendeskripsikan konsep pembangunan yang sesuai dengan sosial dan budaya di Indonesia. Empat dasar tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945 meliputi: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperan serta membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Untuk melakukan pembangunan yang merata perlu di lakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang matang. Kemajuan pembangunan daerah dapat diukur melalui besarnya pertumbuhan ekonomi (Purba *et al.*, 2021, p. 13). Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan atau penurunan hasil ekonomi suatu daerah selama masa tertentu. Untuk mengetahui penurunan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah perlu dilihat dengan membandingkan satu periode dengan periode lainnya (Munthe *et al.*, 2021, p. 43).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi biasanya di ukur dengan melihat PDRB (Rapanna, Sukarno and Syamsul, 2017, p. 7). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total penjumlahan penghasilan barang dan jasa dari 17 sektor

perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat di katakan mengalami kenaikan ketika PDRB riil pada daerah tersebut meningkat setiap tahunnya.

Menurut Todaro pertumbuhan ekonomi memiliki 3 faktor utama berupa (1) akumulasi modal yang terdiri dari semua jenis investasi yang di tanamkan pada tanah (2) pertumbuhan penduduk, dan (3) teknologi. Untuk mendapatkan investasi produktif, daerah perlu juga melakukan investasi pendukung salah satunya berupa investasi pada sektor infrastruktur. Umumnya para ekonom sepakat bahwa laju pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat melalui pembangunan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur dapat meningkatkan produktifitas suatu daerah (Rahayu and Soleh, 2017, p. 126).

Teori model pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) berprinsip bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang di dasarkan pada kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi dan modal keuangan, sedangkan tugas pemerintah adalah mempertimbangkan infrastruktur, hukum dan pertukaran internasional sebagai faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari teori ini peneliti menggunakan variabel infrastruktur sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas kabinet kerja. Semenjak tahun 2015, belanja subsidi dialihkan oleh pemerintah menjadi belanja produktif yaitu untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan serta pendidikan (Kemenkeu.go.id, 2018) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas

antar wilayah serta memicu perkembangan ekonomi di bermacam daerah di tanah air. Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat seperti mempermudah pendistribusian produk, menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya dan menarik investor untuk berinvestasi serta dapat meningkatkan kualitas penduduk di wilayah tersebut.

Dampak untuk perekonomian dari penambahan investasi pada infrastruktur bisa dirasakan secara langsung, seperti bertambahnya lapangan kerja, sedangkan secara tidak langsung akan memberikan dampak kepada sektor-sektor lainnya untuk lebih berkembang karena infrastruktur merupakan penghubung antara sektor satu dengan yang lainnya (Rahayu and Soleh, 2017, p. 126).

Menurut Surachman (2021, p. 4) infrastruktur merupakan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan urusan ekonomi, bisnis baik oleh organisasi maupun individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa infrastruktur adalah bangunan fisik yang digunakan untuk membantu kepentingan umum dalam menjalankan kegiatan setiap harinya.

Infrastruktur merupakan cakra penggerak pertumbuhan ekonomi. Kurangnya infrastruktur akan menjadi hambatan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi (Imp and Resmi, 2018, p. 2). Standart pertumbuhan suatu negara sampai saat ini masih ditentukan oleh bidang kontruksi. Bidang kontruksi memegang peranan dalam pembangunan infrasrtukur yang memungkinkan kenaikan mobilitas masyarakat dan perdagangan serta aspek sosial lainnya.

Salah satu faktor yang menggerakkan mobilitas masyarakat ialah tersedianya infrastruktur jalan antar wilayah yang memadai. Selain itu menurut Mesak Iek

(2013, p. 32) infrastruktur jalan ialah infrastruktur dasar untuk menentukan kelancaran perputaran barang, jasa, modal dan informasi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Sehingga pendistribusian barang, jasa, modal dan informasi lancar dengan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, selain itu juga akan menimbulkan dampak positif lainnya seperti terjangkau harga barang dan jasa di pasar.

Selain infrastruktur jalan, infrastruktur listrik juga sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi karena di zaman sekarang hampir semua alat produksi menggunakan mesin, dan untuk menjalankannya di butuhkan aliran listrik. Jika suatu wilayah masih sulit atau belum dialiri listrik maka produksi dan aktivitas ekonomi lainnya akan dilakukan secara manual hal tersebut bisa menghambat proses produksi dan jumlah barang yang di hasilkan. Sehingga dapat berdampak juga kepada pendapatan PDRB.

Infrastruktur pembangunan pada dasarnya dapat di bedakan menjadi: (1) infrastruktur ekonomi yaitu bangunan fisik yang digunakan dalam proses produksi dan digunakan oleh masyarakat termasuk semua infrastruktur publik seperti infrastruktur listrik, telekomunikasi, transportasi, irigasi, air minum dan sanitasi, dan (2) infrastruktur sosial yaitu infrastruktur seperti kesehatan dan pendidikan (Maqin, 2011, p. 11).

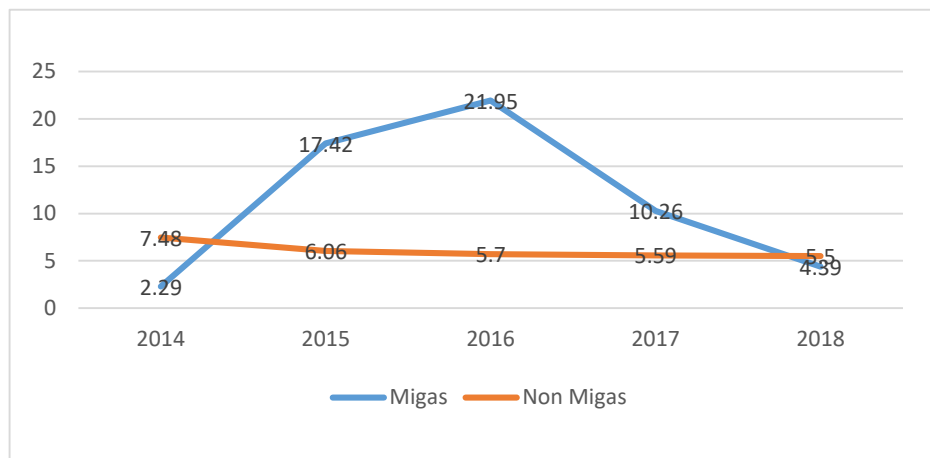
Pemerintah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal landasan pembangunan, yang juga menjadi salah satu faktor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di perlukan pendidikan yang layak. Sesuai dengan

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran untuk meningkatkan kualitas diri”. Pendidikan yang layak dapat di wujudkan dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Selain membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, sumber daya manusia yang sehat pun menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Kesehatan adalah kebutuhan utama setiap manusia, karena masyarakat yang sehat dapat menghasilkan suatu produktifitas yang baik bagi daerahnya (Safira, Djohan and Nurjanana, 2019, p. 211). Untuk memenuhi kesehatan setiap masyarakat diperlukannya fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai di setiap wilayah.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dengan jarak $\pm$ 110 km dari Ibu Kota Provinsi. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 230.706 ha. Secara administratif bagian barat Kabupaten Bojonegoro berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Blora, bagian utara dengan Kabupaten Tuban, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan yang meliputi 11 kelurahan dan 430 desa (BPS Kab Bojonegoro, 2018)

Gambar 1. 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro AHDK Tahun 2014-2018 (Dalam Persen)



Sumber: diolah (BPS Bojonegoro, 2018)

Dapat dilihat dari Gambar 1.1 meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tiap tahunnya mengalami fluktuatif tetapi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010-2018 selalu bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 21.95% sedangkan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 1.26%.

Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 sektor unggulan yang menopang perekonomian daerahnya. Sektor pertama dari PDRB migas yaitu sektor pertambangan dan penggalan, sektor ini menyumbang PDRB terbesar. Tetapi PDRB dari sektor pertambangan dan penggalan sempat mengalami penurunan di tahun 2016-2017 hal ini terjadi karena tingkat harga minyak dunia yang anjlok. Sedangkan sektor tertinggi ke dua dari PDRB non migas yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan (Bojonegorokab.go.id).

Untuk menunjang kedua sektor dan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Bojonegoro di perlukannya infrastruktur dasar yang memadai, infrastruktur dasar

yang dimaksud seperti infrastruktur jalan, listrik, fasilitas kesehatan, dan juga pendidikan. Sesuai program kerja pemerintah pusat Kabupaten Bojonegoro juga terus berusaha membenahi infrastruktur yang ada dengan memfokuskan arahan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur.

Tabel 1. 1.
Infrastruktur Jalan, Listrik, Pendidikan, dan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Listrik (Pelanggan)	Fasilitas Pendidikan (Unit)	Fasilitas Kesehatan (Unit)
2014	628.789	339,774	2284	2118
2015	628.789	323,379	2311	2150
2016	628.786	334,508	2294	2178
2017	649.788	351,206	2295	2187
2018	813.266	360,071	2312	2210

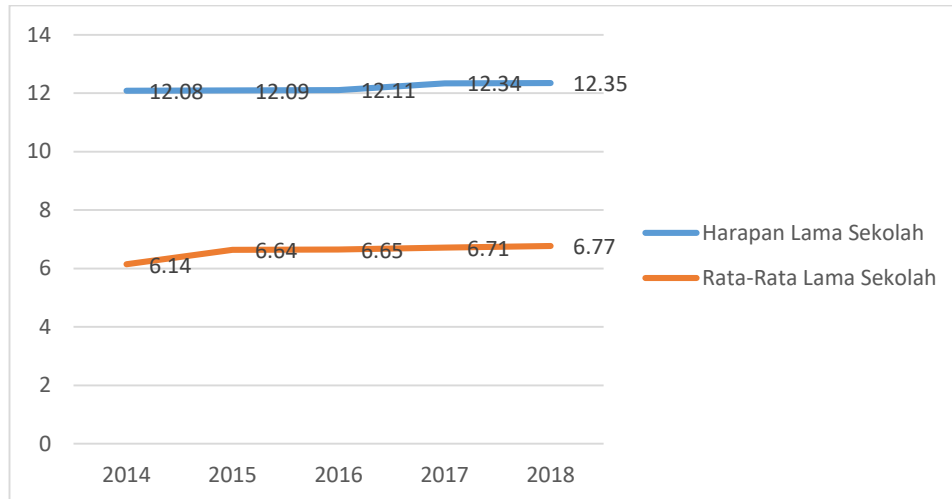
Sumber: (BPS Bojonegoro)

Kondisi infrastruktur jalan yang di lihat melalui panjang jalan di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2014-2018 yang di tunjukkan pada tabel 1.2 cenderung mengalami peningkatan, Kabupaten Bojonegoro terus melakukan pembenahan pada infrastruktur jalan dengan peningkatan pembangunan jalan cor dan perluasan jalan untuk meningkatkan daya saing produk nasional serta mendukung kelancaran distribusi barang, jasa dan informasi.

Sedangkan untuk infrastruktur listrik seperti yang terlihat pada tabel 1.2 setiap tahunnya pelanggan listrik mengalami peningkatan. Dan jika di lihat persebaran pasokan listrik di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan daya yang terjual di tiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya usaha dari

pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Dengan terpenuhinya pasokan listrik dapat membantu masyarakat berproduktif.

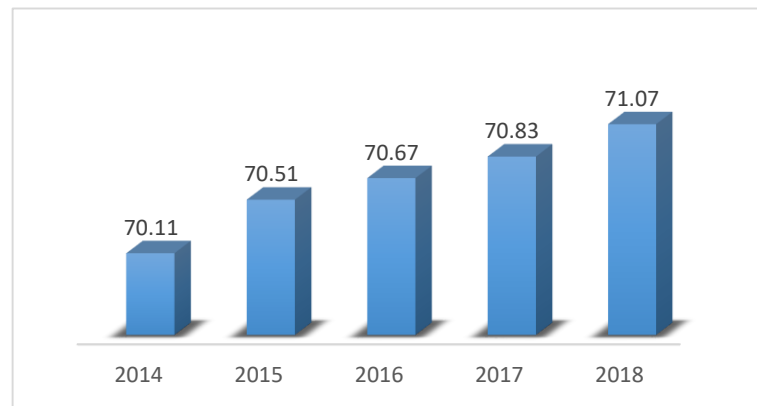
Gambar 1. 2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018 (Dalam Tahun)



Sumber: diolah (BPS Bojonegoro, 2019)

Selain infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik pertumbuhan ekonomi juga di dukung dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Untuk infrastruktur pendidikan yang terdiri dari jumlah unit TK, RA, SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Bojonegoro cenderung mengalami fluktuatif. Tetapi jika dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bojonegoro terus meningkat hal ini menunjukkan Kabupaten Bojonegoro terus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang akan membantu meningkatkan produktifitas daerah.

Gambar 1. 3. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014-2018 (Dalam Tahun)



Sumber: diolah (BPS Bojonegoro, 2019)

Pada gambar 1.3 di tampilkan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2014-2018 selalu meningkat. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah indikator yang digunakan untuk menilai berhasil tidaknya pembangunan kesehatan di suatu daerah (Riyan, Koleangan and Kalangi, 2019, p. 47). Hal ini membuktikan Kabupaten Bojonegoro terus melakukan penambahan infrastruktur kesehatan untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat dan menghasilkan masyarakat yang sehat.

Berdasarkan yang telah di paparkan, investasi pada sektor infrastruktur memiliki fungsi yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya infrastruktur akan mempengaruhi produktifitas suatu daerah. Belum adanya penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro tentang pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi serta selama kurun waktu 10 tahun Kabupaten Bojonegoro banyak melakukan pembangunan dan pembenahan infrastruktur yang dapat dilihat pada tabel 1.2, infrastruktur Kabupaten Bojonegoro tiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi jika dilihat pada gambar 1.1

menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif, oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019?
2. Apakah ada pengaruh infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019?
3. Apakah ada pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2010-2019?
4. Apakah ada pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2010-2019?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019.

1.4. RUANG LINGKUP

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data *times series*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010 sampai dengan

2019. Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta dan data yang ada pada fenomena yang sedang diteliti.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syaraat untuk menyelesaikan dan mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi salah satu informasi untuk mengetahui pengaruh infrastruktur (jalan, listrik, pendidikan, dan kesehatan) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2019.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi ilmiah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya bagi mahasiswa yang akan meneliti pada bidang yang sama yaitu pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengambil dan membuat keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan daerah.